ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA KEDIRI

TAHUN 2009-2013

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri

OLEH:

RISWAN APRILIA

NPM: 11.1.02.01.0156

FAKULTAS EKONOMI

PRODI AKUNTANSI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2016

RISWAN APRILIA

NPM: 11.1.02.01.0156

Judul:

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009-2013

Telah Disetujui untuk Diajukan kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNP Kediri

Tangal: 15 Januari 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si.	Dr. H. M. Anas, SE., M.M., M.Si.
NIDN: 0710106402	NIDN: 0028106601

Skripsi oleh:

RISWAN APRILIA

NPM: 11.1.02.01.0156

Judul:

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009-2013

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP Kediri
Pada Tanggal: 1 Februari 2015

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si.
2. Penguji I : Dr. H. M. Anas, SE., M.M., M.Si.
3. Penguji II : Sigit Puji Winarko, S.E, S.Pd., M.Ak.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS NUSANTARA FAKULTAS EKONOMI PGRI KEDIRI

Dr. SUBAGYO, M.M.
NIDN: 0717066601

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009-2013

RISWAN APRILIA
11.1.02.01.056
EKONOMI – AKUNTANSI
rizwanunreleased@gmail.com
Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si. dan Dr. H. M. Anas, SE., M.M., M.Si.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Kediri. Penggunaan data dalam menganalisis adalah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan, anggaran belanja dan realisasi belanja, serta anggaran pembiayaan dan realisasi pembiayaan Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi varian (selisih) anggaran pendapatan dan belanja, pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah, derajat desentralisasi, kemandirian daerah, efektifitas dan efisiensi pajak daerah, efisiensi belanja, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perkembangan SILPA.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri dalam merealisasikan pajak daerah pada tahun 2009 sampai 2013 dapat dikatakan efektif dan efisien, dan pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2009 sampai 2013 Pemerintah Kota Kediri sudah tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan desentralisasi dapat dilaksanakan cukup baik. Dalam merealisasikan anggaran belanja dapat dikatakan efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan. Pada pembiyaan, adanya perkembangan SILPA yang bersaldo positif menunjukkan kesehatan fiskal.

Kata Kunci: Pendapatan, desentralisasi PAD, pajak daerah, efektifitas, efisiensi, belanja, pembiayaan, SILPA.

1. Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.

Kota Kediri sebagai salah satu kota di provinsi Jawa timur memliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kota Kediri digerakkan oleh sektor tersier dan sektor sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan, telekomunikasi, dan industri yang dapat meningkatkan PAD. Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/pendapatan terbesar Kota Kediri adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat dan PAD-nya masih relatif kecil.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Kediri".

2. Identifikasi Masalah

1. Tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan karena masih banyak pemerintah daerah di Indonesia masih belum baik dalam kinerja keuangan.
2. Anggaran seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin dapat diperoleh. Hal ini dilakukan agar realisasi anggaran pendapatan lebih besar jumlanya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, serta anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi yang dapat dicapai. Hal ini berakibat terjadi inefisiensi anggaran.
3. Penggunaan analisis kinerja keuangan masih kurang pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah, padahal lembaga komersial telah menerapkan dan memanfaatkan analisis kinerja keuangan sebagai cara evaluasi kinerja perusahaan.
4. Para pengguna laporan keuangan kebanyakan tidak mampu memahami akuntansi dan kurang dapat memahami serta mengintepretasikan laporan realisasi anggaran, sehingga perlu analisis kinerja keuangan yang dapat menjadi alat bantu untuk

memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami dan mengintepretasikan laporan realisasi anggaran.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah kinerja pengelolaan keuangan pendapatan dan belanja daerah Kota Kediri. Periode yang dilakukan adalah tahun 2009-2013. Penelitian ini mengambil data dari web resmi pemerintah kementerian keuangan Republik Indonesia yang bernama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id), serta web resmi pemerintah Kota Kediri (www.pemkotkediri.go.id). Penelitian ini mengambil data anggaran APBD dan data laporan realisasi anggaran APBD Kota Kediri periode 2009-2013 sebagai sumber analisis mengenai kinerja pengelolaan keuangan APBD Kota Kediri.

4. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan anggaran pendapatan Kota Kediri tahun 2009-2013 dengan menggunakan analisis varian pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, dan analisis rasio keuangan ?
2. Bagaimana kemampuan kinerja anggaran belanja dan pembiayaan Kota Kediri tahun 2009-2013 dengan menggunakan analisis belanja dan analisis pembiayaan ?

5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan Kota Kediri selama periode 2009-2013.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dan pembiayaan Kota Kediri selama periode 2009-2013.

6. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada. Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama

berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa yang akan datang. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini bagian keuangan Kota Kediri diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntanbilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

A. Metode

1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kinerja pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel bebas dalam peneltian ini adalah anggaran APBD dan laporan realisasi APBD.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dan merupakan studi kasus pada pada obyek yang diteliti.. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kota Kediri dengan mengambil data dari web resmi pemerintah kementrian keuangan Republik Indonesia yang bernama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id), serta web resmi pemerintahan kota kediri (www.pemkotkediri.go.id).

Pengambilan data yang tertera di atas dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kediri selama periode 2009-2013. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti, oleh karena itu subjek pada penelitian ini adalah kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri. Objek pada penelitian ini adalah anggaran APBD dan laporan realisasi APBD Kabupaten Kediri tahun 2009-2013.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *file research* (penelitian lapangan) berupa dokumentasi dan wawancara, dan metode *library* research (penelitian kepustakaan).

6. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun t}}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun t}} \times 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

$$\frac{\text{PAD Tahun t} - \text{PAD Tahun (t 1)}}{\text{PAD Tahun (t 1)}} \times 100\%$$

c. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah:

1) Derajat Desentralisasi

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2)Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

4) Derajat Kontribusi BUMD

$$\frac{\text{Pendapatan Bagian Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

a. Analisis Varians Belanja Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t}}{\text{Anggaran Belanja Tahun t}} \times 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t} \quad \text{Realisasi Belanja Tahun t} \quad 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun t} \quad 1} \times 100\%$$

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah

1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

e. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan dengan cara membandingkan SILPA di anggaran APBD dengan laporan realisasi APBD.

B. Hasil dan Kesimpulan

1. Hasil Analisis

No.	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan	Hasil Penelitian (%)
A	**Analisis Kinerja Pendapatan**	
	1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan	113,2%
	2. Analisis Pertumbuhan	14%

	Pendapatan (PAD dan Total Pendapatan)	11%
	3. Analisis Rasio Keuangan	
	a. Derajat Desentralisasi	14,2%
	b. Kemandirian Keuangan Daerah	27,9%
	c. Efektivitas dan Evisiensi Pendapatan Asli Daeah (PAD)	130% 3,3%
	d. Derajat Kontribusi BUMD	1%
B	**Analisis Kinerja Belanja**	
	a. Analisis Varians Belanja	7,71%
	b. Analisis Pertumbuhan Belanja	12%
	c. Total Keserasian Belanja	
	-Belanja Operasi dan Belanja Modal	77,5% 22,5%
	-Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	44,67% 55,33%
	d. Analisis Efesiensi Belanja Daerah	>100% (104%)
C	**Analisis Pembiayaan**	>100% (249,11%)

2. Pembahasan

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapaten Daerah

a. Analisis Varian Pendapatan Daerah

Analisis varian pendapatan dikatakan memiliki kinerja pengelolaan keuangan pendapatan yang baik jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan), sedangkan kinerja keuangan pendapatan dinilai kurang baik jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) (Mahmudi, 2010). Analisis varians secara umum menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan pendapatan daerah Kota Kediri dapat dikatakan baik ditunjukkan dengan sebagian besar tahun yang diteliti mengalami selisih lebih. Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatannya yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan pendapatan cenderung meningkat jika mengalami pertumbuhan secara positif, sedang dikatakan kinerja pengelolaan keuangan pendapatan mengalami penurunan jika mengalami pertumbuhan secara negatif (Mahmudi, 2010). Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah secara umum kinerja pengelolaan keuangan pendapatan daerah kota kediri mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu

pertumbuhan PAD 14% dan pertumbuhan total pendapatan 11%. Pertumbuhan paling tinggi PAD terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai angka 29% dan pertumbuhan total pendapatan terjadi pada tahun 2012 yaitu mencapai angka 18%. Pertumbuhan PAD paling rendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 2%, sedangkan pertumbuhan total pendapatan paling rendah pada tahun 2011 yaitu 3%. Jika terjadi pertumbuhan yang positif maka menunjukkan terjadi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pendapatan.

c. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1) Derajat Desentralisasi

Artikel yang diterbitkan Kementerian Keuangan (2011) menyebutkan jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi.Derajat desentralisasi Kota Kediri menunjukkan angka rata-rata 14,2% sehingga dapat dikatakan rendah. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 16,2%, sedangkan derajat desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 12,9%. Semakin rendah kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Artikel Kementerian Keuangan (2011) menjelaskan jika Rasio ketergantungan keuangan daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Kediri menunjukkan angka rata-rata sebesar 27,9%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 39,3%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 6,97%. Angka di atas 50% memperlihatkan bahwa Kota Kediri sudah tidak terlalu tergantung terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, sedang Rasio Efisiensi Pajak dikatakan baik jika kurang dari 10%. Rasio Efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2009-2013 menunjukkan Pemerintah Kota Kediri telah melakukan efektivitas pajak dengan rata-rata rasio 130%, sedangkan pada tahun 2009-2013 Pemerintah Kota Kediri sudah efesiensi dalam penanganan pajak daerah dengan rata-rata rasio 3,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri dalam mengelola pajak daerah telah efektif dan efisien.

4) Derajat Kontribusi BUMD

Jika dilihat dari Derajat Kontribusi BUMD, pemerintah daerah dikatakan telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah jika rasio ini menunjukkan angka di atas 0%. Derajat Kontribusi BUMD Kota Kediri

menunjukkan angka rata-rata lebih dari 0% yaitu 1%. Kontribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 4%, sedangkan kontribusi BUMD terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 1%. Hal ini menunjukkan bahwa BUMD yang ada di Pemerintah Kota Kediri telah memiliki kontribusi terhadap besarnya pendapatan daerah Kota Kediri.

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Jika Analisis Varians Belanja Daerah terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki kinerja keuangan belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja keuangan Belanja dinilai baik (Mahmudi, 2010). Analisis Varians Belanja Daerah menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan belanja kota kediri dapat dikatakan belum baik. Hal ini ditunjukkan dengan hampir semua realisasi belanja melebihi anggaran belanja kecuali tahun 2013 dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2009-2013 yang mencapai angka rata-rata 7,71%. Pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Kenaikan belanja daerah dikatakan wajar atau tidak perlu melihat inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, penyesuaian faktor makro ekonomi dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Secara umum Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan belanja Kota Kediri mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 12%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 34%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 1%.

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah umumnya menunjukkan bahwa proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen dan proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2010). Analisis Keserasian Belanja Daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2009-2013 rata-rata belanja operasi sebesar 77,5% sedangkan untuk belanja modal sebesar 22,5%. Selama tahun 2009-2013 rata-rata belanja langsung sebesar 44,67% sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar 55,33%. Hasil ini juga dapat dikatakan bahwa Kota Kediri merupakan salah satu daerah yang memiliki pendapatan tinggi.

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Pemerintah daerah dinilai dari Analisis Efisiensi Belanja Daerah, dikatakan telah melakukan efisiensi

anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010). Analisis Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kota Kediri belum melakukan efisiensi belanja selama tahun 2009-2013 dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 104%. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran belanja Kota Kediri yang terdapat angka melebihi anggaran belanja kecuali tahun 2013.

3. Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kinerja pemerintah Kota Kediri secara umum belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari realisasi SILPA yang selama tahun 2009-2013 lebih besar dari anggaran SILPA dengan rata-rata rasio presentasemya 249,11%.

3. Kesimpulan

1. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Kediri dilihat dari analisis varians, secara umum sudah dapat dikatakan baik karena realisasi pendapatan melampaui target anggaran, dimana dari tahun 2009-2013 rata-rata mencapai 113,2% realisasi pendapatannya.
2. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Kediri dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan Kota Kediri tahun 2009-2013 tidak baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD dan Pendapatan yang positif yaitu 14% dan 11%. Pertumbuhan PAD dan Pendapatan tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif.
3. Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Kediri masih rendah dengan rata-rata pada tahun 2009-2013 yaitu 14,2%. Kemandirian keuangan Kota Kediri masih rendah tetapi mempunyai kecenderungan naik dengan rasio kemandirian rata-rata yaitu hanya 27,9%. Pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Dinas Pendapatan daerah sudah efektif dalam merealisasikan pajak daerah yaitu 130%. Dinas Pendapatan Daerah sudah efisien dalam menggunakan biaya pemungutan pajak untuk dapat merealisasikan pendapatan pajak yang diterima dengan tingkat efisiensi rata-rata pajak daerah ada 3,3%. Sedangkan derajat kontribusi BUMD terhadap PAD masih sangat kecil yaitu sebesar 1% pada tahun 2009-2013.
4. Kinerja belanja pemerintah Kota Kediri dapat dilihat dari analisis varians secara umum kinerja keuangan belanja kota kediri dapat dikatakan belum baik. Hal ini ditunjukkan dengan hampir semua realisasi belanja melebihi anggaran belanja kecuali tahun 2013 dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2009-2013 yang mencapai angka rata-rata 7,71%.
5. Pertumbuhan belanja Kota Kediri menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 12% dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif.
6. Analisis keserasian belanja daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk belanja modal. Selama tahun 2009-2013 rata-rata belanja operasi sebesar 77,5%

sedangkan untuk belanja modal sebesar 22,5%. Selama tahun 2009-2013 rata-rata belanja langsung sebesar 44,67% sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar 55,33%.

7. Analisis efisiensi belanja daerah menunjukkan bahwa Kota Kediri belum melakukan efisiensi belanja selama tahun 2009-2013 dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 104%.
8. Kinerja pemerintah Kota Kediri dari analisis pembiayaan secara umum belum berjalan dengan baik, karena pada tahun 2009-2013 realisasi SILPA selalu melebihi dari anggaran SILPA dengan rasio presentase 249,11%.

C. Daftar Pustaka

Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.* Erlangga, Jakarta.

Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah,* Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* UU STIM YPKN, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2010. *Akuntansi Sektor Publik.* Andi. Yogyakarta.

Nordiawan, Dedi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat,* Jakarta.

Sugiyono, 2006. *Statiska Untuk Penelitian. Cetakan Sembilan,* CV Alfabeta, Bandung.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara.*

_____,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Pemerintah Daerah.*

_____,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

_____,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara dan Intepretasinya.*

_____,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

_____,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah.*

_____,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____,Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.pemkotkediri.go.id